

Kepemimpinan Perempuan dalam Organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) di Tingkat Wilayah Sumatera Utara

Women's Leadership in the Muhammadiyah Student Association (IPM) Organization at the level of North Sumatera Region

Vini Alfialita¹⁾, Payerli Pasaribu²⁾

1) Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

2) Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan landasan Muhammadiyah dalam memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin organisasi, menganalisis pemimpin perempuan dalam melaksanakan tugas kepemimpinan di organisasi IPM, serta mendeskripsikan hambatan dan kendala yang dihadapi oleh pemimpin perempuan dalam melaksanakan tugas kepemimpinan di Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa landasan Muhammadiyah memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin organisasi didasarkan pada Keputusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menyatakan kebolehan perempuan menjadi pemimpin, sehingga pandangan Muhammadiyah terhadap pemimpin perempuan adalah memperbolehkan dan mendukung. Pemimpin perempuan dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan di PW IPM Sumut yaitu dengan menggunakan prinsip kolektif kolegial. Tugas-tugas kepemimpinan yang ada di PW IPM Sumut yaitu mengarahkan organisasi sesuai dengan visi dan misi, mengayomi dan menggerakkan anggota, menjaga komunikasi yang baik dengan anggota, menjalankan program kerja, mengambil keputusan, melaksanakan kontrol dan perbaikan-perbaikan atas kesalahan, serta mendelegasikan wewenang kepada anggota. Adapun hambatan dan kendala bagi pemimpin perempuan yaitu datang dari luar organisasi dan dari dalam organisasi sendiri.

Kata Kunci: Pemimpin perempuan, organisasi IPM, tugas kepemimpinan

Abstract

This study aims to describe the foundation of Muhammadiyah in allowing women to become leaders of organization, analyze women's leaders in carrying out leadership tasks in IPM organizations, and describe the obstacles and constraints faced by women leaders in carrying out leadership tasks in Regional Leadership Ties for Muhammadiyah Students in North Sumatera. The method used is qualitative research method with a descriptive approach, and data collection techniques with observation, in-depth interviews, and documentation. This research concludes that the foundation of Muhammadiyah allows women to become leaders of organizations based on the decision of the Tarjih Council of Muhammadiyah's Central Leadership which states the ability of women to become leaders, so that the Muhammadiyah's view of women leaders is to allow and support. Women leaders in carrying out leadership tasks in PW IPM Sumut that is by using collective collegial principles. Leadership tasks that exist in PW IPM Sumut are directing the organization in accordance with the vision and mission, protecting and moving members, maintaining good communication with members, running work programs, making decisions, implementing control and correction for mistakes, and delegating authority to members. As for obstacles for women leaders that come from outside the organization and from within the organization itself.

Keywords: Women leaders, IPM organization, leadership tasks

*Corresponding author:

E-mail: vinialfialita@gmail.com

ISSN 2549-1660 (Print)

ISSN 2550-1305 (Online)

PENDAHULUAN

Feminisme perempuan mengatakan bahwa perempuan merupakan konstruksi sosial yang identitasnya dikonstruksikan dan ditetapkan melalui penggambaran. Sehingga dalam hal ini, perempuan merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan jenis atau kelompok serta membedakannya dari jenis atau kelompok lainnya (Humm, 2002).

Pada dasarnya, perempuan kerap diidentikkan dengan urusan domestik. Sedangkan laki-laki identik dengan ranah publik yang bertugas bekerja mencari nafkah. Laki-laki adalah pemimpin, baik di dalam keluarga maupun di luar. Namun perkembangan zaman telah membuat para perempuan memiliki pemikiran yang lebih maju dengan ikut andil dalam ranah publik. Perempuan masa kini sudah mulai mengambil posisi pada bagian-bagian sentral seperti halnya pada posisi pemimpin dalam sebuah kepemimpinan, baik dalam kepemimpinan politik maupun kepemimpinan organisasi.

Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan lebih untuk mengatur orang lain atau orang yang dipimpinya (Veithzal, 2013). Sedangkan

kepemimpinan merupakan masalah hubungan dan pengaruh antara yang memimpin dengan yang dipimpin (Kartono, 2008). Kesempatan untuk menjadi pemimpin adalah terbuka baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Namun di dalam agama Islam sendiri, terjadi perbedaan pandangan bagi para ulama terkait dengan kebolehan seorang perempuan menjadi pemimpin. Bagi yang kontra terhadap kepemimpinan perempuan beranggapan bahwa yang lebih diutamakan untuk menjadi seorang pemimpin dalam sebuah kepemimpinan adalah laki-laki. Sedangkan Pihak yang pro terhadap kepemimpinan perempuan menganggap bahwa laki-laki dan perempuan adalah sederajat sebagaimana yang tercantum dalam *Surah Al-Hujurat* ayat 13, yang menunjukkan bahwa perempuan diperbolehkan menduduki posisi pemimpin, sehingga terdapat salah satu organisasi otonom Muhammadiyah, yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) pada tingkat Wilayah Sumatera Utara yang dipimpin oleh seorang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa di organisasi ini antara perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi ketua atau pemimpin.

Ikatan Pelajar Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi berbasis pelajar dan juga salah satu organisasi otonom Muhammadiyah yang didirikan sebagai bentuk respon terhadap penjagaan ideologi pelajar dari ideologi komunis yang berkembang (Khoirudin, 2016).

Dalam penelitian ini penulis berusaha memberikan deskripsi dan analisis terhadap kepemimpinan perempuan yang ada di Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumatera Utara dengan melihat landasan Muhammadiyah dalam memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin organisasi, tugas-tugas kepemimpinan, serta hambatan dan kendala bagi pemimpin perempuan.

Menurut penelitian Hakim (2015) yang memfokuskan pada kedudukan perempuan dalam Islam menurut Nasaruddin Umar, Islam pada dasarnya mengakui kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah setara, karena keduanya diciptakan dari satu *nafs* (*genus*), dimana tidak ada diskriminasi antara perempuan maupun laki-laki dan tidak ada pula paham *the second sex* seperti yang terdapat dalam tradisi Kristen atau Yahudi. Laki-laki dan

perempuan memiliki status dan hak yang sama dalam strata sosial.

Hanapi (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa di dalam Islam, perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Tidak ada yang memiliki kedudukan lebih tinggi atau lebih rendah. Bahkan kedudukan antara perempuan dan laki-laki adalah sama di dalam hukum. Dalam budaya Aceh, masyarakat memberikan peluang kepada perempuan untuk berkiprah di level publik.

Menurut penelitian Meizara (2016) bahwa setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang khas yang ditentukan oleh kompetensi, kepribadian, pengalaman dan kondisi organisasi yang dipimpinya.

Selanjutnya menurut penelitian Nurasmah (2018) bahwa kepemimpinan perempuan organisasi sosial keagamaan terbentuk karena adanya proses yang dimulai dari perempuan itu sendiri yang memiliki pengalaman organisasi, baik organisasi kampus maupun organisasi sosial kemasyarakatan, sehingga kepemimpinan perempuan lebih cenderung pada arah kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan dan tugas.

Penelitian ini melihat kepemimpinan perempuan dengan menggunakan teori status dan feminis muslim. Status merupakan kumpulan dari hak-hak dan kewajiban (Soekanto, 2006). Teori ini digunakan untuk melihat bagaimana seorang perempuan bisa mendapatkan haknya sebagai pemimpin dan bagaimana perempuan tersebut dalam waktu yang bersamaan harus menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin.

Status yang berkembang di dalam masyarakat ada tiga, yaitu *ascribed status* (status yang diperoleh dari kelahiran), *achieved status* (status yang diperoleh dari kemampuan dan usaha masing-masing individu), dan *assigned status* (status yang diperoleh dari pemberian).

Sedangkan teori feminis muslim digunakan dalam penelitian ini untuk melihat kecenderungan dari organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah dalam memandang permasalahan gender dan feminisme. Qibtiyah (2019) membagi tipologi pemikiran Muslim tentang gender dan feminisme di Indonesia menjadi tiga kelompok, yaitu literalis, moderat dan progresif/kontekstualis. Kelompok literalis pada umumnya

menentang filsafat pembaruan, termasuk pandangan tentang gender dan feminisme. Menurut kelompok ini, gender dan feminisme merupakan ideologi yang berasal dari Barat dan tidak sesuai dengan tradisi keislaman.

Berbeda dengan kelompok literalis, kelompok moderat menerima gagasan-gagasan feminis selagi gagasan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar keislaman. kelompok moderat terkadang menggunakan metode kontekstual dalam membaca dan memahami ayat-ayat tersebut, tergantung dengan kebutuhannya. Sedangkan Menurut kelompok progresif/kontekstualis, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan adalah mutlak dalam seluruh aspek kehidupan. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kelompok ini sangat bertentangan dengan kelompok literalis.

Adanya perempuan yang menjadi pemimpin di organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah menunjukkan bahwa organisasi ini memandang gagasan-gagasan yang berkaitan dengan gender dan feminis tidak secara harfiah saja, namun juga secara kontekstual.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiono, 2016).

Sedangkan menurut Arikunto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan berdasarkan kategorinya untuk mendapatkan sebuah kesimpulan (Arikunto, 1997).

Jenis penelitian ini digunakan agar dapat mendeskripsikan dan menganalisis mengenai kepemimpinan perempuan di dalam organisasi Ikatan pelajar Muhammadiyah (IPM) di tingkat wilayah Sumatera Utara. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Ketua Umum PW IPM Sumut beserta beberapa Ketua Bidang baik yang laki-laki dan perempuan, serta ustadz yang berasal dari organisasi Muhammadiyah

Lokasi penelitian dalam penelitian ini berada di wilayah Medan dan Stabat. Adapun alasan pemilihan lokasi dikarenakan pusat kegiatan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumatera Utara berada di Medan dan Ustadz yang menjadi informan dalam penelitian ini berada di Stabat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Muhammadiyah Memperbolehkan Perempuan Menjadi Pemimpin

Mengenai landasan Muhammadiyah memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin organisasi didasarkan pada pandangan Muhammadiyah terhadap pemimpin perempuan. Berdasarkan wawancara pada tanggal 11 februari 2020 dengan Bapak Irfan yang merupakan seorang ustadz sekaligus alumni IPM yang sekarang menjabat sebagai Ketua Majelis Dikdasmen (Pendidikan Dasar dan Menengah) PCM Stabat mengatakan:

“Kedudukan perempuan di Muhammadiyah itu berdampingan dengan laki-laki. Tidak mesti dia juga berada di bawah laki-laki, tapi bisa berbarengan dengan laki-laki.”

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 13 Februari 2020 dengan Ustadz Asrizal, seorang

ustadz sekaligus alumni organisasi IPM yang sekarang menjabat sebagai Ketua Koordinator Infokom (Informasi dan Komunikasi) PDM Deli Serdang, yang mengatakan:

“Kalau menurut Tarjih Muhammadiyah, tafsiran Surah An-Nisa’ itu dikhususkan hanya untuk atau dalam konteks keluarga. Jadi laki-laki adalah pemimpin perempuan itu ya di dalam keluarga. Kalau di luar itu ya perempuan juga bisa memimpin.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa pandangan Muhammadiyah terhadap pemimpin perempuan adalah memperbolehkan dan mendukung perempuan untuk menjadi pemimpin organisasi.

Muhammadiyah dalam memandang boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin mengacu pada Himpunan Putusan Tarjih di Wiradesa yang menyatakan kebolehan seorang perempuan menjadi pemimpin. (Tarjih, 1997)

Alasan majelis tarjih menyatakan bahwa seorang perempuan boleh menjadi pemimpin adalah karena tidak adanya dalil yang merupakan *nash* untuk melarang perempuan menjadi pemimpin, baik itu pemimpin negara, hakim, camat,

pemimpin organisasi, dan lain sebagainya. (Tarjih, 1997)

Adanya sebuah hadis yang menyatakan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin disebabkan karena kaum yang dipimpin oleh seorang perempuan akan menjadi tidak beruntung. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Bakrah yang menyatakan bahwa:

“Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita.” (HR. Al-Bukhari, an-Nasa’i, at-Tirmidzi dan Ahmad)

Muhammadiyah dalam memahami hadis di atas yaitu dengan menggunakan pemahaman yang kontekstual. Artinya tidak terpaku pada teks atau pemahaman yang secara harfiah saja. Muhammadiyah memandang bahwa adanya hadis di atas disebabkan karena pada waktu itu kondisi perempuan belum memungkinkan untuk menangani urusan kemasyarakatan, karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman. Sedangkan pada zaman sekarang sudah banyak perempuan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang terkait dengan urusan kemasyarakatan tersebut

Selain hadis di atas, ada juga ayat di dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar tidak diperbolehkannya perempuan menjadi pemimpin, yaitu Surah An-Nisa' ayat 34.

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka." (Q. S. An-Nisa : 34)

Majelis Tarjih Muhammadiyah memandang bahwa ayat tersebut tidak melarang perempuan untuk menjadi pemimpin. Karena memang tidak ada pernyataan dari ayat tersebut yang menyatakan secara tegas bahwa perempuan dilarang atau tidak diperbolehkan menjadi pemimpin.

Adanya keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang menyatakan kebolehan perempuan menjadi pemimpin menyebabkan adanya pemimpin perempuan di salah satu organisasi otonomnya, yaitu IPM.

Pemimpin Perempuan dalam Melaksanakan Tugas Kepemimpinan di IPM

Dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan, Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumatera Utara menggunakan prinsip kolektif kolegial, yaitu saling bekerjasama antara orang-orang yang ada di dalam kepemimpinan tersebut. Artinya tugas-tugas kepemimpinan tidak hanya dilakukan oleh ketua umum saja, namun seluruh pengurus yang ada di Pimpinan Wilayah Ikatan pelajar Muhammadiyah juga ikut bersama-sama menjalankan tugas kepemimpinan tersebut.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 6 Februari 2020 dengan Haris, Ketua Bidang Organisasi PW IPM Sumut mengatakan:

"Tugas kepemimpinan di IPM ini abang kira mengarahkan organisasi ini sesuai visi misi yang ada, sesuai program kerja yang ada. Visi kita ya tetap menjadikan pelajar-pelajar Islam ini dapat bersaing gitu, dalam bekerja, berpolitik dan lain sebagainya. Terus tugasnya juga bisa ngambil keputusan lah."

Sedangkan wawancara dengan Sri yang merupakan Ketua Bidang Ipmawati PW IPM Sumut pada tanggal 6 Februari 2020 mengatakan:

“Tugasnya ya juga mengayomi lah. Apalagi kan yang jadi ketua itu perempuan, jadi kan ya harus merangkul laki-laki gitu. Itu kan susah gitu kadang-kadang laki-laki untuk di atur.”

Taufiq, Ketua Bidang Advokasi PW IPM Sumut dalam wawancara tanggal 6 Februari 2020 mengatakan:

“Tugas jadi pemimpin di IPM ya yang pertama pandai mengayomi. Yang kedua pandai berkomunikasi.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa tugas-tugas kepemimpinan yang ada di PW IPM Sumut adalah sebagai berikut:

1. Mengarahkan organisasi sesuai dengan visi dan misi IPM
2. Mengayomi dan menggerakkan anggota
3. Menjaga komunikasi yang baik dengan anggota
4. Menjalankan program kerja
5. Mengambil keputusan
6. Melaksanakan kontrol dan perbaikan-perbaikan atas kesalahan
7. Mendelegasikan wewenang kepada anggota

Setiap kepemimpinan adalah unik, karena selalu ada perbedaan antara kepemimpinan yang satu dengan kepemimpinan yang lainnya. Pemimpin perempuan berbeda dengan pemimpin laki-laki, meskipun tugas yang harus dijalankan di dalam kepemimpinan adalah sama. Namun, cara untuk menjalankan tugas-tugas kepemimpinan tersebut berbeda antara pemimpin perempuan dengan pemimpin laki-laki. Perbedaan dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan tersebut menunjukkan bahwa pemimpin perempuan di PW IPM Sumut memiliki kelebihan dalam hal menjalankan tugas-tugas kepemimpinan tersebut.

Haris yang merupakan Ketua Bidang Organisasi PW IPM Sumut dalam wawancara tanggal 6 Februari 2020 mengatakan:

“Kalau perempuan, kalau Hanifah itu lebih merasa. Nanti ada yang salah sikit dia langsung merasa, ini kok kayak gini. Tapi kalau laki-laki, dia lebih cuek. Perempuan ni juga mudah diterima orang lain. Ketika dia mencoba masuk ke mana gitu, misalnya ke Kadis, mau jumpai Kadis. Nah ketika itu seorang perempuan, itu mudah diterima.”

Sedangkan Akbar yang merupakan Ketua Bidang Perkaderan PW IPM Sumut dalam wawancara tanggal 6 Februari 2020 mengatakan:

“Kelebihan dari pemimpin perempuan ini dia panjang untuk mengambil keputusan ini. Sehingga bisa dibilang juga keputusan yang panjang itu banyak pertimbangan. Dari banyaknya pertimbangan, untuk akurasi ataupun keakuratan keputusan itu besar. jadi kesalahannya bisa dibilang mustahil lah.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka diketahui bahwa kelebihan pemimpin perempuan di PW IPM Sumut adalah sebagai berikut:

1. Peduli terhadap anggota

Pemimpin perempuan memiliki kepekaan besar terhadap anggotanya. Hal tersebut menyebabkan pemimpin perempuan menjadi lebih peduli dengan anggotanya. Kepedulian ini ditujukan kepada semua anggotanya tanpa memandang bahwa anggotanya tersebut laki-laki atau perempuan

2. Pandai Melobi dan Mudah Diterima

Melobi bukan merupakan hal asing lagi dalam kepemimpinan di IPM. Tidak jarang seorang pemimpin harus bertemu

dengan seseorang untuk melobi atau meminta tolong. Hal ini ternyata juga terjadi di Kepemimpinan IPM Wilayah Sumatera Utara. Terjalankannya berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumatera Utara tidak terlepas dari usaha pemimpinnya dalam melobi orang-orang penting yang dapat membantu terjalankannya kegiatan tersebut.

3. Perlahan-lahan dalam Mengambil Keputusan

Pemimpin perempuan dalam mengambil keputusan melalui banyak pertimbangan. Sehingga untuk memutuskan sesuatu biasanya secara perlahan karena harus mempertimbangkan segala hal. Meskipun terkesan lama karena perlahan-lahan dalam mengambil keputusan, hal tersebut malah menjadi kelebihan bagi pemimpin perempuan. Keputusan yang diambil secara perlahan-lahan dan tidak terburu-buru akan menghasilkan keputusan yang baik bagi keberlangsungan organisasi karena keputusan tersebut diambil dengan melakukan banyak pertimbangan.

Hambatan dan Kendala bagi Pemimpin Perempuan

Menjadi pemimpin perempuan bukanlah hal yang mudah. Hal tersebut disebabkan karena adanya hambatan dan kendala bagi pemimpin perempuan dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya.

Haris yang merupakan Ketua Bidang Organisasi PW IPM Sumut dalam wawancara tanggal 6 Februari 2020 mengatakan:

“Hambatan perempuan jadi pemimpin, kalau pemikiran orang awam diluar organisasi, itu senior dulu yang bilang, kalau perempuan ini nanti sulit, nanti tengah malam ada yang penting yang mau dibicarakan itu sulit ngajak keluar malamnya. Tapi saya kira itu hanya kekhawatiran-kekhawatiran aja. Kembali lagi, setiap orang itu punya ciri khas masing-masing. Ada yang dia gak bisa seperti itu. Ada yang bisa.”

Sedangkan Akbar yang merupakan Ketua Bidang Perkaderan PW IPM Sumut dalam wawancara tanggal 6 Februari 2020 mengatakan:

“Kadang kalau dia menggerakkan anggota melalui share ke grup, kadang ditelponi masing-masing, masalah datang atau gak datang anggotanya itu ketika

diintruksikan, nah itu lah kendalanya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka diketahui bahwa hambatan dan kendala bagi pemimpin perempuan dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan di PW IPM Sumut ada yang berasal dari luar organisasi dan ada juga yang berasal dari dalam organisasi sendiri.

Kendala yang berasal dari luar organisasi dapat datang dari orang tua ataupun dari masyarakat luar. Kendala yang datang dari orang tua biasanya adalah tidak diizinkan untuk mengikuti organisasi, kemudian adanya batasan dari orang tua bahwa sang anak tidak boleh pergi keluar rumah. Selain itu adanya anggapan di masyarakat bahwa anak perempuan lebih baik berada di rumah dan tidak boleh pulang malam.

Sedangkan kendala yang berasal dari dalam organisasi adalah Kendala tersebut datang dari sesama anggota dan pengurus organisasi, seperti sukanya mengulur-ulur waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Kebiasaan dalam mengulur-ulur waktu menjadi kendala yang sangat mengganggu proses kepemimpinan.

Berdasarkan teori status, maka status sebagai pemimpin termasuk *achieved status*. Hal ini dikarenakan status sebagai pemimpin bisa diperoleh melalui usaha dan perjuangan dari masing-masing individu. Artinya, menjadi seorang pemimpin bukanlah sebuah takdir dan pemberian semata. Namun status sebagai pemimpin bisa diperoleh karena kemampuan yang dimiliki oleh seseorang tanpa memandang jenis kelamin, keturunan, ataupun hal lain yang bersifat lahiriah.

Sedangkan jika dilihat dari teori Feminis Muslim, maka kelompok moderat adalah kelompok yang menerima gagasan-gagasan tentang gender dan feminisme selagi tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam. Kelompok ini dalam memahami ayat Al-Qur'an dan Hadis dengan menggunakan pemahaman secara kontekstual, yaitu tidak secara harfiah saja, namun disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi zaman. Hal ini sesuai dengan yang ada di Muhammadiyah, khususnya mengenai kepemimpinan perempuan di salah satu organisasi otonomnya yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah.

Dengan adanya keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai kebolehan perempuan menjadi pemimpin, menyebabkan Ikatan Pelajar Muhammadiyah juga tidak mempermasalahkan perempuan menjadi pemimpin. Sehingga di Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumatera Utara, ketua umumnya adalah seorang perempuan. Tidak hanya itu saja, bahkan yang menjadi Ketua Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan (PIP) dan Ketua Bidang Ipmawati adalah seorang perempuan.

SIMPULAN

Landasan Muhammadiyah memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin organisasi didasarkan pada Keputusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menyatakan kebolehan perempuan menjadi pemimpin, sehingga pandangan Muhammadiyah terhadap pemimpin perempuan adalah memperbolehkan dan mendukung. Pemimpin perempuan dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan di PW IPM Sumut yaitu dengan menggunakan prinsip kolektif kolegial. Tugas-tugas kepemimpinan yang ada di PW IPM Sumut yaitu

mengarahkan organisasi sesuai dengan visi dan misi, mengayomi dan menggerakkan anggota, menjaga komunikasi yang baik dengan anggota, menjalankan program kerja, mengambil keputusan, melaksanakan kontrol dan perbaikan-perbaikan atas kesalahan, serta mendelegasikan wewenang kepada anggota. Adapun hambatan dan kendala bagi pemimpin perempuan yaitu datang dari luar organisasi dan dari dalam organisasi sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (1997). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Coughlin, L. (2005). *Enlightened Power, How Women are Transforming the Practice of Leadership*. San Fransisco: Jossy Bass
- Hakim, L. (2015). *Kedudukan Perempuan dalam Islam (Studi Pemikiran Nasaruddin Umar)*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Hanapi, A. (2015). Peran Perempuan dalam Islam. *Gender Equality, International Journal of Child and Gender Studies*. 15-26.
- Hasibuan, M. S. (2014). *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Humm, M. (2002). *Ensiklopedia Feminisme*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Kartono, K. (2008). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khoirudin, A. (2016). *Ideologi Gerakan Ikatan Pelajar Muhammadiyah*. Yogyakarta: Lembaga Pengembangan Sumberdaya Insani (LaPSI) Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah.
- Meizara, E. dkk. (2016). Analisis Kompetensi Kepemimpinan Wanita. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 175-181.
- Mulyana, D. (2003). *Metode Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurasmah. (2018). *Kepemimpinan Perempuan pada Organisasi Sosial Keagamaan*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Qibtiyah, A. (2019). *Feminisme Muslim di Indonesia*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Shihab, M. Q. (2007). *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Spradley, J. P. (1997). *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Veithzal, R. M. D. (2013). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wursanto, I. (2005). *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Tarjih, PP Muhammadiyah. (1997). *Tanya Jawab Agama Jilid 4*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Sandiah, F. A, dan Khairul Arifin (Ed). (2016). *Tanfudz Muktamar XX Ikatan Pelajar Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah.
- Syafina, R (Ed). (2019). *Tanfudz Musyawarah Wilayah XX Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumatera Utara.